

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah menjadi isu penting yang terjadi seiring dengan perkembangan dan aktivitas pembangunan yang terus meningkat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang mengharuskan pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan landasan hukum dan kejelasan tanggung jawab guna mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.

Masalah sampah merupakan isu global yang semakin kompleks dan mendesak untuk diatasi. Di Indonesia, jumlah sampah terus meningkat setiap tahunnya, terutama di daerah perdesaan. Permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah mengenai sampah, permasalahan sampah yang terlihat saat ini yaitu sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya dan polusi air yang dikarenakan penanganan air yang kurang tepat serta menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit dan juga banjir.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah. Banyak sungai yang mengalami pencemaran akibat sampah domestik, termasuk plastik dan limbah rumah tangga, yang berasal dari masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Praktik pembuangan sampah langsung ke sungai sering terjadi akibat

tidak tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan kurangnya perhatian dari pemerintah desa. (Nggilu dkk., 2022)

Berbicara mengenai masalah sampah, banyak masyarakat yang tidak mematuhi adanya aturan, khususnya daerah pinggiran sungai, masih banyak sampah yang menumpuk di tepian dan di genangan sungai dikarenakan kurangnya sarana prasarana dan kesadaran masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak selalu berjalan efektif. Penelitian pada berbagai daerah menunjukkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, koordinasi antar-aktor yang lemah, serta komunikasi kebijakan yang belum optimal (Okhtafianny & Ria, 2023).

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang beragam. Dengan hal itu, pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adanya kebijakan seperti undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan bupati tentang pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran dan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan dalam pengelolaan sampah di daerah. Peraturan daerah yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang, organisasi, maupun lembaga/instansi namun kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Selain pemerintah, partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih belum maksimal.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan mengenai sampah, pemerintah daerah telah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan sampah yang terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai tidak selalu berjalan dengan baik, karena masih terdapat masyarakat yang membuang sampah di sungai dan tepian sungai. Pemerintah perlu menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat supaya membuang sampah ke sungai tidak menjadi kebiasaan. Pembuangan sampah di sungai juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang menggunakan air, selain itu apabila air sungai meluap maka akan banyak sampah-sampah yang sangkut di tepian sungai.

Masyarakat Desa Padang Tanggul masih ada yang tidak menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan tepian sungai. Kebiasaan masyarakat Desa Padang Tanggul membuang sampah ke sungai juga dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti tidak banyaknya tempat sampah dan tidak tersedianya layanan angkutan sampah.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena-fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan, diantaranya:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sampah, yang mana masih ditemukannya praktik pembuangan sampah di sungai dan di tepian sungai oleh masyarakat.

2. Keterbatasan fasilitas persampahan, seperti kurangnya tempat sampah dan tidak tersedianya layanan angkutan sampah, sehingga masyarakat kebiasaan menumpuk sampah di tepian sungai dan membuang sampah ke sungai.
3. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat untuk tidak menjadikan kebiasaan membuang sampah di sungai dan di tepian sungai.

Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk mempertegas fakta atau fenomena serta ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan, terhadap permasalahan menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas.

Maka peneliti memfokuskan penelitian dalam model Implementasi Kebijakan Jan Merse (Reno Affrian, 2023: 47-48) yaitu:

1. Informasi
2. Isi Kebijakan
3. Dukungan Masyarakat
4. Pembagian Potensi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)?
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus

Desa Padang Tanggul). Dan sebagai bahan masukan bagi Desa Padang Tanggul dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai. Selain itu, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:

- a. Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lanjutan sejenis dengan penelitian ini secara lebih khusus lagi terkhusus membahas implementasi kebijakan publik.
- b. Bagi Instansi, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat membuka ruang kesadaran diri dan mampu merubah pola sikap dan perilaku agar berpartisipasi dalam mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan mematuhi aturan.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan, terutama tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).